

## **BAB IV**

### **SRI SULTAN HB IX DAN AGRESI MILITER BELANDA II**

#### **A. Perjanjian Renville**

Pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini dibuktikan dengan adanya serangan militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Terjadinya peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan dengan membentuk *Committee of Good Offices* (Komisi Jasa Baik) yang terdiri wakil-wakil dari AS, Australia dan Belgia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Komisi ini juga disebut dengan Komisi Tiga Negara (KTN)<sup>1</sup>

Mula-mula mereka berusaha mengenal dan memahami keadaan dan persoalan yang akan mereka hadapi. Untuk itu berdasarkan keputusan Dewan Keamanan, mereka menggunakan jasa para Konsul beserta peninjau-peninjau militer untuk menyusun laporan yang disampaikan dan diterima Dewan Keamanan tanggal 14 Oktober 1947. Pada tanggal 27 Oktober 1947 anggota-anggota Komisi Jasa Baik tiba di Jakarta. Sementara itu pihak Republik Indonesia tidak bersedia mengadakan pertemuan dengan Belanda di Yogyakarta atau di Jakarta. Pihak Republik hanya bersedia mengadakannya di tempat yang netral.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masing-masing anggota KTN adalah Frank Graham (Amerika), Richard Kirby (Australia) dan Paul van Zeeland (Belgia). Kelak anggota dari masing-masing negara ini mengalami pergantian.

<sup>2</sup> K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : Renville*. Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 24.

Pada bulan Januari 1948 tercapai suatu persetujuan baru di atas kapal Amerika USS Renville di pelabuhan Jakarta. Persetujuan ini mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut dengan garis *Van Mook*, suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda walaupun dalam kenyataannya masih tetap ada banyak daerah yang dikuasai pihak Republik di belakangnya.<sup>3</sup> Dengan menerima perjanjian ini maka RI mendapatkan simpati Amerika dan hal ini sangat menentukan ke depannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Secara garis besar Persetujuan Renville tersebut terdiri dari 3 naskah, yaitu sebagai berikut.

1. Persetujuan gencatan senjata yang antara lain berisi ketentuan diterimanya garis demarkasi *Van Mook*.
2. Dasar-dasar Politik Renville yang pada pokoknya berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN.
3. Enam pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap di tangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak NIS (Negara Indonesia Serikat).

Kedua naskah yang pertama ditandatangani pada 17 Januari 1948 dan naskah terakhir ditandatangani pada 19 Januari 1948. Bagi RI persetujuan Renville sebenarnya dapat digunakan untuk mengkonsolidasi kekuatan militernya, terlebih

---

<sup>3</sup> Dinamakan *Van Mook* karena dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu yang bernama Dr. H. Van Mook.

lagi simpati dunia kepada RI semakin kuat karena RI selalu bersedia menerima petunjuk-petunjuk KTN yang mewakili PBB serta selalu menunjukkan sikapnya yang cinta damai.

Menurut Notosutardjo isi dari Persetujuan Renville yang terdiri dari tiga bagian adalah sebagai berikut.<sup>4</sup>

### **1. Persetujuan Tanggal 17 Januari 1948 (Gencatan Senjata)**

Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dan seterusnya dinamai pihak-pihak, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut.

- a. Dengan segera setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak menembak dalam tempo 48 jam. Perintah ini akan berlaku atas pasukan-pasukan kedua belah pihak, pada sebelah tempat masing-masing yang telah diterangkan dalam pengumuman dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947, garis-garis tersebut dinamakan garis *status quo* dan di daerah-daerah termaktub dalam ayat yang berikut;
- b. Dalam instansi pertama dan untuk sementara akan diadakan daerah-daerah sesuai dengan garis *status quo*, sebagai kebiasaan daerah-daerah ini melingkungi garis-garis *status quo* pada sebelah pihak, garis dari pihak Belanda yang terkemuka dan pada pihak lain, garis dari pihak Republik yang paling depan, sedang lebarnya sesuatu daerah harus sama;

---

<sup>4</sup> Notosutardjo, *Konperensi Meja Bundar-KMB*. Jakarta : Penerbit Endang, 1956, hlm. 193-199.

- c. Mengadakan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer sekali-kali tidak menyangkut hak dari kedua belah pihak menurut resolusi dari Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus dan tanggal 1 November 1947;
- d. Setelah yang tertulis di atas diterima oleh kedua belah pihak, maka Komisi akan menyerahkan pembantu-pembantu militernya kepada kedua belah pihak, sedang pembantu-pembantu tersebut akan menerima petunjuk-petunjuk dan menerima pertanggungjawaban untuk menentukan, apakah penyelidikan atas sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar-pembesar dari satu atau kedua pihak;
- e. Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab atas tertib tenram dan keselamatan jiwa dan harta benda penduduk dalam daerah-daerah yang dikosongkan akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak. Polisi untuk sementara waktu, memakai tenaga personal militer sebagai polisi sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi di bawah kontrol sipil. Pembantu-pembantu militer dari Komisi setiap waktu bersedia memberi nasehat kepada kedua belah pihak dan menyerahkan tenaganya bila dianggap perlu. Diantaranya mereka itu mesti :
  - 1) mendapat bantuan dari opsiro-opsir Polisi, yang ditempatkan oleh salah satu pihak dalam tempat-tempat yang tidak diduduki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam menyelenggarakan kewajiban mereka. Opsiro-opsir polisi dari satu pihak tidak

dibenarkan berada di daerah pihak lainnya, kecuali bersama-sama dengan pembantu militer Komisi dan opsir polisi dari pihak lain;

2) menambah kerja sama antara kedua belah pihak polisi;

f. Perdagangan dan lalu lintas antara daerah-daerah diusahakan supaya lebih maju dan meningkat pada hal-hal yang perlu, maka kedua belah pihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan Komisi dan wakil-wakilnya, bilamana hal ini dirasa perlu;

g. Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis di bawah ini, yang mana dasar-dasarnya telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai berikut.

1) Dilarang mengadakan sabotase, menakut-nakuti, pembalasan dendam dan lain-lain tindakan yang serupa terhadap orang-orang dan harta benda, baikpun perusahaan atau barang-barang apa saja dan tiap-tiap orang dan memakai alat-alat apa saja, supaya mencapai maksud tersebut;

2) Tidak akan mengadakan siaran-siaran radio atau propaganda yang lain untuk menentang atau mengacaukan tentara dan rakyat;

3) Siaran-siaran radio dan lain-lain untuk maksud memberi tahu kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menepati pasal-pasal yang tersebut dalam sub a dan b;

4) Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pembantu-pembantu militer dan sipil, yang diperbantukan pada KTN;

- 5) Penghentian dengan segera penyiaran pengumuman harian tentang gerakan-gerakan atau macam pemberitahuan tentang gerakan ketentaraan, kecuali jika sebelumnya telah disetujui dengan tulisan oleh kedua belah pihak, tidak termasuk penyiaran-penyiaran minggu dari daftar orang-orang (dengan menyebut nama, nomor, kenyataan dan alamat rumah), yang tewas atau meninggal karena luka-luka yang didapatnya dalam menjalankan kewajiban;
  - 6) Penerimaan atas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pihak dan pemulaian perundingan tentang sesuatu pengwujudan yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya, pembebasan mana dalam asasnya akan berlaku dengan tidak mengingat pada jumlah tawanan kedua pihak;
- h. Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu-pembantu militer Komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan apakah atau di mana, terutama di Jawa Barat, kesatuan-kesatuan tentara Republik mengadakan perlawanan di belakng kedudukan terdepan dari tentara Belanda yang sekarang. Jika penyelidikan itu membuktikan adanya kesatuan-kesatuan yang semacam itu, maka kesatuan-kesatuan itu secepat mungkin, tapi bagimanapun juga dalam 21 hari, akan mengundurkan diri secara yang disebutkan dalam pasal berikut;
- i. Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing dalam sesuatu daerah, yang diterima sebagai daerah yang didemiliterisasi, atau dalam sesuatu daerah di ebelah daerah yang didemiliterisasi dari pihak

yang lain, akan mengundurkan diri, di bawah pengawasan pembantu militer Komisi itu dengan membawa senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang menuju daerah yang didemiliterisasi. Kedua pihak berjanji akan melancarkan pengungsian kekuatan tentaranya masing-masing dengan cepat dan tenang;

- j. Persetujuan ini dipandang masih memikat selama waktu empat belas hari dan selalu dengan sendirinya diperpanjang dengan empat belas hari, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan pada KTN dan pada pihak lain, yang berpendapat, bahwa peraturan-peraturan gencatan senjata tidak ditaati oleh pihak yang lain dan oleh karenanya persetujuan itu hendaknya diakhiri pada akhir waktu empat belas hari yang berlangsung.

## **2. Persetujuan 17 Januari 1948 (Dasar Persetujuan Politik Renville)**

Komisi Tiga Negara telah diberitahukan oleh kedua delegasi, bahwa pemerintah masing-masing telah menerima pokok-pokok perjanjian penghentian tembak menembak yang sudah ditandatangani dan merupakan dasar untuk perundingan politik buat selanjutnya, ialah sebagai berikut.

- a. Bantuan dari KTN akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau-pulau Jawa, Sumatera dan Madura, berdasarkan prinsip naskah Linggarjati;
- b. Telah sewajarnya, bahwa kedua pihak tidak berhak menghalangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka yang sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Juga telah disetujui bahwa kedua pihak akan memberi jaminan tentang adanya

kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaaan mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan dalam penyiaran, asal jaminan ini tidak dianggap meliputi juga propaganda untuk menjalankan kekerasan dan pembalasan;

- c. Telah sewajarnya bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan dalam pemerintahan pamong praja di daerah-daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sepenuhnya dan sukarela dari penduduk di daerah-daerah itu pada suatu saat, setelah dapat dijamin keamanan dan ketenteraman dan tidak adanya lagi paksaan kepada rakyat;
- d. Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politik dilakukan pula persapan-persiapan untuk lambat laun mengurangi jumlah kekuatan tentaranya masing-masing;
- e. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian penghentian permusuhan dan sebaik dapat dilaksanakan perjanjian itu, maka kegiatan dalam lapangan ekonomi, perdagangan, perhubungan dan pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerja bersama-sama dimana harus diperhatikan kepentingan-kepentingan semua bagian lain di Indonesia;
- f. Bahwa akan diadakan plebisit sesudah waktu yang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun, setelah ditandatangani perjanjian, dalam waktu mana dapat terjadi tukar-menukar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-soal yang penting secara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Dalam waktu itu, dapat diadakan pemilihan umum secara

merdeka agar rakyat Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendiri di lapangan politik dalam hubungan dengan NIS;

- g. Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan undang-undang dasar akan dipilih secara demokratis untuk menetapkan suatu undang-undang dasar buat NIS;
- h. Setelah ditandatanganinya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pertama, jika salah satu dari kedua pihak meminta kepada PBB untuk mengadakan suatu badan buat melakukan pengawasan sampai saat diserahkannya kedaulatan pemerintah Belanda kepada pemerintah NIS, maka pihak yang kedua akan menimbangnya dengan sungguh-sungguh;
- i. Kemerdekaan bebas buat bangsa Indonesia seluruhnya;
- j. Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia;
- k. Satu negara berdasarkan federasi yang berdaulat dan dengan suatu undang-undang dasar yang timbulnya melalui jalan-jalan demokrasi;
- l. Suatu Uni dari NIS dengan Kerajaan Belanda dan bagian-bagiannya yang lain, di bawah turunan raja Belanda.

### **3. Persetujuan Tanggal 19 Januari 1948**

KTN berpendapat, bahwa keterangan dasar di bawah ini antara lain akan dipergunakan sebagai dasar perundingan untuk penyelesaian politik, yaitu sebagai berikut.

- a. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Belanda sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada NIS. Sebelum masa perlihan

- demikian itu habis temponya, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan NIS. Jika sudah terbentuk, NIS akan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Belanda Indonesia, dikepalai oleh Turunan Raja Beelanda. Hal status RI adalah sebagai negara yang bergabung dalam NIS;
- b. Dalam pemerintahan federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam undang-undang NIS, kepada negara-negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil;
  - c. Sebelum KTN dibubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna membantu menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak yang lainnya tidak boleh berkeberatan atas permintaan demikian itu, permintaan tersebut harus dimajukan oleh pemerintah Belanda kepada Dewan Keamanan;
  - d. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan tapi tidak lebih dari satu tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah rakyat di daerah benar-benar tersebut akan turut dalam RI atau masuk bagian yang lain di dalam lingkungan NIS. Plebisit ini diadakan dibawah pengawasan KTN, jika kedua pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan, supaya KTN memberikan bantuan dalam soal

tersebut. Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu;

- e. Sesudah ditetapkan batas-batas negara-negara bagian yang dimaksud itu, maka akan diadakan rapat pembentukan undang-undang dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan konstitusi buat NIS. Wakil-wakil dari negara-negara bagian akan mewakili seluruh rakyat;
- f. Jika ada negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menandatangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal c dan d dalam persetujuan Linggarjati, kedua pihak tidak akan keberatan diadakan perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa dengan NIS.

Itulah isi dari Persetujuan Renville yang merugikan RI sehingga P.M. Amir pun mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Kepungan Belanda atas ibukota RI melalui pendirian negara boneka di wilayah yang telah dikuasainya juga semakin rapat. Hal ini mengakibatkan jatuhnya kabinet pimpinan P.M. Amir (yang juga merupakan delegasi RI dalam Perundingan Renville).

Berhubung diperlukannya suatu pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan persetujuan Renville dan karena situasi yang dihadapi begitu sulit baik karena hal yang berhubungan dengan pertikaian melawan Belanda maupun banyak hal lain dalam ketentaraan, maka kabinet baru perlu dibentuk. Meskipun

demikian baik Partai Masyumi maupun PNI tidak berkeinginan untuk memegang pimpinan kabinet.<sup>5</sup>

Akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet. Susunan kabinet ini didominasi oleh Masyumi dan PNI. Program-program kabinet ini terdiri atas 4 pasal :

1. Melaksanakan ketentuan Persetujuan Renville dan melanjutkan perundingan dengan Belanda dengan perantaraan KTN
2. Mempercepat pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat
3. Rasionalisasi TNI
4. Pembangunan kembali kerusakan-kerusakan yang disebabkan perang dan pendudukan Jepang.

Pelaksanaan Persetujuan Renville membawa pada hal yang pahit bagi TNI, terlebih bagi Divisi Siliwangi pimpinan Kolonel Nasution. Pasukan Divisi Siliwangi yang tersebar di Jawa Barat harus meninggalkan wilayahnya menuju wilayah Republik sesuai dengan persetujuan garis demarkasi *Van Mook*. Hijrah pasukan ini kelak kemudian akan ditempatkan di wilayah yang merupakan wilayah Divisi IV yang bermarkas di Solo. Beratnya pemindahan pasukan Siliwangi ini dapat tergambar dalam sebuah kutipan sebagai berikut :

Kami tunduk pada disiplin dan patuh kepada kebijaksanaan pemerintah! Walaupun dengan hati yang pedih berkeping-keping, namun kami bergerak juga berhijrah, meninggalkan segala-galanya yang kami cintai, semuanya yang dekat di hati kami, yakni kampung halaman, sanak saudara dan sejawat seperjuangan Jawa Barat. Selamat tinggal wahai

---

<sup>5</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 II*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1988, hlm. 23.

segala yang kami sayangi. Sampai bersua kembali! Kami berjanji dalam hati suci kami, bahwa kami Insya Allah akan kembali lagi.<sup>6</sup>

Perundingan dengan perantaraan KTN baru bisa dimulai kembali pertengahan Maret 1948, hal ini dikarenakan kelambatan Belanda menunjuk wakilnya untuk berunding dengan RI. Penundaan ini sepertinya disengaja dan ada hubungannya dengan pendirian negara-negara bagian yang telah dirampas Belanda dari RI, yaitu Madura, Pasundan, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Pendirian negara-negara bagian itu disertai pula dengan pendirian pemerintah Federal Sementara yang disponsori oleh Belanda. Pihak RI menuduh Belanda telah melanggar Persetujuan Renville, begitu pula dengan Belanda yang telah menuduh RI melanggar persetujuan karena RI terus memperluas hubungan dengan luar negeri.<sup>7</sup>

Pada bulan Juli pihak Belanda membentuk Majelis Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federale Overleg/ BFO*) yang terdiri dari pemimpin-pemimpin negara federal tersebut. Mereka bermaksud membentuk suatu Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal dengan atau tanpa persetujuan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Keadaan di dalam Republik di Jawa pada tahun 1948 sangat kacau. Kekuasaan RI semakin sempit sedangkan penduduk bertambah akibat masuknya

---

<sup>6</sup> Sejarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*. Jakarta, 1967, hlm. 216.

<sup>7</sup> Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>8</sup> M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 341.

penduduk dari daerah luar Republik yang harus ditinggalkan. Penderitaan semakin parah dengan adanya blokade oleh Belanda dan penduduk pun kekurangan beras.

Macetnya perundingan karena kebuntuan yang dialami membuat KTN mengusahakan kembali agar perundingan dapat dibuka. Wakil dari AS yang baru, Merle Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang kemudian dikenal dengan Rencana Cochran. Secara garis besar nota tersebut berisi sebagai berikut.

1. Mempertahankan hubungan luar negeri Republik
2. Seluruh angkatan perang serta seluruh perangkatnya termasuk tentara Kerajaan Belanda yang ada di Indonesia, ditempatkan di bawah kekuasaan Pemerintah Serikat
3. Utang-utang Hindia Belanda kepada Belanda, yang dibuat setelah tahun 1942 akan dirundingkan cara pengembaliannya.<sup>9</sup>

RI kecewa dengan usul Cochran karena dianggap telah mengorbankan sejumlah kepentingan RI sedangkan Belanda belum puas karena belum dianggap memadai. Hal ini mengakibatkan usaha Merle Cochran telah gagal. Perundingan RI dengan Menlu Belanda Stikker secara langsung pun telah gagal. Dengan kondisi yang demikian itu maka Belanda pada tanggal 11 Desember 1948 menyatakan bahwa kemungkinan untuk melanjutkan perundingan tidak ada. Belanda juga menyatakan bahwa Pemerintah Federal Sementara tetap akan berfungsi tanpa menanti ikut sertanya RI.

Pada 13 Desember 1948 Hatta minta kepada Cochran agar perundingan bisa dibuka kembali. Hatta menyatakan bahwa RI bersedia mengakui hak veto

---

<sup>9</sup> Tobing, *op. cit.*, hlm. 133.

Komisaris Tinggi Mahkota (kepala pemerintahan Hindia Belanda) dengan batas-batas tertentu. Empat hari kemudian Belanda memberikan jawaban yang ultimatif yang menuntut agar pihak RI menyetujui tuntutan-tuntutannya dalam waktu 18 jam. Ditegaskan pula bahwa RI dimasukkan ke dalam federasi dengan kedudukan sama dengan negara bagian lainnya. Waktu 18 jam bukanlah waktu yang panjang dan sangat singkat bagi RI untuk mempelajarinya.

### **B. Agresi Militer Belanda Kedua**

Sementara Belanda secara sepihak melanjutkan dengan penyelesaian federal mereka, perundingan-perundingan antara mereka dan pihak RI otomatis terhenti. Hatta tidak bersedia mengabulkan keinginan Belanda yang menuntut agar pihak Belanda yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negeri selama masa peralihan. Belanda juga memberikan pilihan agar tentara RI diintegrasikan ke dalam tentara federal. Kebuntuan pun mulai muncul dan menimbulkan keadaan yang gawat dan membahayakan bagi gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Tuntutan-tuntutan Belanda atas RI semakin kuat dan menekan. Belanda menuntut pembubaran TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang utama itu. Belanda sangat tangkas melancarkan perang totalnya, walaupun dalam kondisi gencatan senjata. Mereka terus menyerang pada bidang politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Kebuntuan antara kedua belah pihak mengantarkan Belanda kepada aksi militer yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan militer

---

<sup>10</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. Bandung : Disjarah dan Angkasa, 1979, hlm.165.

tersebut dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda Kedua. Sekitar pukul 06.00 kapal-kapal terbang Belanda mulai menyerang Yogyakarta. Mereka membom lapangan udara Maguwo dan menembaki jalan-jalan raya, asrama-asrama tentara dan gedung-gedung pemerintah. Pasukan payung Belanda pun mulai diterjunkan.<sup>11</sup> Serangan Belanda atas Yogyakarta diceriterakan oleh Ibu Juariah Suhardi sebagai berikut :

...disitu TNI juga tidak mengerti bahwa di Yogyakarta diduduki Belanda. Pesawat sudah meraung-raung kira-kira jam enam pagi, justru penduduk taunya itu adalah latihan pasukan RI. Jadi suasannya tidak menentu waktu itu. Baru kira-kira pukul setengah tujuh baru ada kabar bahwa ada pendudukan Belanda. Ternyata Belanda sudah menurunkan parasit pasukan Belanda. Penduduk waktu itu ketakutan dan banyak yang mengungsi.<sup>12</sup>

Saat itu Yogyakarta tidak mengadakan perlawanan yang berarti. Semua induk pasukan yang bermarkas di Yogyakarta sedang berada di luar kota untuk mengadakan latihan perang. Tentara yang tinggal di kota hanya terdiri dari beberapa regu barisan pengawal, satuan-satuan yang menjaga asrama dan kantor-kantor dengan taruna-taruna TNI yang bermarkas di Maguwo. Beberapa hari sebelum aksi militer Belanda ini, panglima tentara daerah Yogyakarta telah menyiapkan sebuah rencana untuk menghadapi gerakan-gerakan musuh. Logistik-logistik juga telah disiapkan di luar kota untuk mengantisipasi hal ini.<sup>13</sup> Untuk memantapkan kerja sama dan koordinasi antara pasukan-pasukan Yogyakarta, direncanakan mengadakan latihan mulai tanggal 18 Desember 1948.

---

<sup>11</sup> Tobing, *op. cit.*, hlm. 170.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Juariah Suhardi, Kamis 13 Januari 2011.

<sup>13</sup> Wawancara dengan H. Ollot Sajiman, Rabu 22 Desember 2010.

Itulah sebabnya tanggal 18 Desember pada waktu pagi semua pasukan yang ada di Yogyakarta meninggalkan kota dengan seluruh perlengkapannya, kecuali regu penjaga keamanan. Dengan demikian, tanpa disengaja, latihan perang itu telah memungkinkan TNI menyelamatkan perlengkapannya, rakyat dan kota Yogyakarta dari kehilangan, penderitaan dan kerusakan. Mengenai hal itu Soekarno menyatakan seperti dibawah ini.

Setelah menjatuhkan bom selama satu jam dengan diselingi oleh tembakan roket dari pesawat-pesawat P-51, Belanda menduduki pelabuhan udara. Pesawat Spifire buatan Amerika yang terbang rendah menghujangkan pelurunya ke jalanan secara merata. Udara kota Yogyakarta gelap oleh pesawat-pesawat terbang. 1.000 orang pasukan payung menduduki kantor pos, pemancar radio dan membakari mobil-mobil. Tentara Republik yang sudah tinggal kerangka di Yogyakarta ditawan.<sup>14</sup>

Setelah berhasil menguasai Maguwo, pasukan Belanda beralih ke sasaran yang lain, yakni Kota Yogyakarta. Walaupun perlawanan dari pihak Republik sangat kecil namun setidaknya perlawanan tersebut dapat memperlambat gerak pasukan Belanda. Sementara pasukan Belanda sibuk melakukan gerakan ke kota, di tempat kediaman Presiden Soekarno anggota kabinet Republik berkumpul mengadakan sidang darurat.

Menjelang pukul 08.30 Korps Pasukan Khusus lengkap berada di Maguwo, dan pasukan Belanda dapat mulai gerakannya menuju Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak 7 KM sebelah barat Maguwo menuju Yogyakarta. Jalan lama adalah yang terpenting, yaitu jalan dari Solo ke Yogyakarta. Agak di sebelah selatan lapangan terbang terdapat jalan Wonosari-Yogyakarta yang dapat langsung menuju pusat kota.

---

<sup>14</sup> Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung, 1984, hlm. 386.

Kedua jalan ini digunakan pasukan Belanda dalam gerakan ini. Rute utara digunakan separuh pasukan khusus dan 1-15 RI, batalyon dari Brigade T yang baru dibentuk. Sisa pasukan khusus yang lain menerobos ladang dan kampung sebelah selatan lapangan terbang menuju jalan Wonosari-Yogya.<sup>15</sup>

Dalam sidang kabinet RI di Istana Presiden, Soekarno memutuskan untuk menyerahkan diri secara terhormat. Dengan demikian para menteri kemudian memutuskan untuk mengangkat rekan mereka Menteri Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemimpin pemerintah darurat. Sjafruddin pada saat itu sedang berada di Bukit Tinggi, ibu kota Republik di Sumatera. Selain itu Hatta masih membuat pernyataan resmi untuk urusan militer. Pernyataan ini atas desakan Kolonel Simatupang berisi perintah kepada tentara untuk melanjutkan perjuangan, apa pun yang terjadi dengan pemerintah.

Dengan demikian secara garis besar hasil dari Sidang Kabinet pada saat itu memutuskan sebagai berikut.

1. Soekarno, Hatta dan beberapa anggota Kabinet yang lain tetap tinggal di Gedung Negara supaya ditangkap Belanda, agar opini dunia akan bersimpati kepada RI
2. Memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk mendirikan Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
3. Tentara melanjutkan perjuangan gerilya dibawah pimpinan Panglima Besar Soedirman

---

<sup>15</sup> Pierre Heijboer, *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*. Jakarta : Grasindo, 1998, hlm. 143.

4. Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan tetap tinggal di kota.

Akhirnya pada tanggal 20 Desember 1948 Soekarno harus menghadapi panglima pasukan-pasukan Belanda di Jawa Tengah, Jenderal Meijer. Jenderal ini meminta kepada Soekarno supaya mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak kepada TNI yang ditolak mentah-mentah oleh Soekarno karena ia kini berstatus sebagai tawanan yang tidak bisa memberikan perintah kepresidenannya.<sup>16</sup>

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1948, Soekarno, Hatta, Syahrir, Mr. Assaat, Mr. Ali Sasstroamidjojo dan Komodor Udara Suriadarma diterbangkan menuju pulau Bangka. Di sana Soekarno, Syahrir dan Salim dipisahkan dari yang lainnya dan diterbangkan ke Brastagi, kemudian kelak ke Prapat, Danau Toba (Sumatera Utara).<sup>17</sup>

Dengan demikian usaha untuk mempertahankan kedaulatan RI terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama berada di Sumatera oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan rekan-rekannya dalam memimpin PDRI, dimana mereka tetap berhubungan dengan TNI yang bergerilya. Kelompok kedua adalah TNI yang melakukan gerilya dibawah komando Pangsar Soedirman di pedalaman-pedalaman yang dibantu oleh segenap penduduk desa. Kelompok ketiga adalah para diplomat yang berada di luar negeri untuk memperjuangkan secara

---

<sup>16</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*. Jakarta : Sinar Harapan, 1983, hlm. 210.

<sup>17</sup> G.M. Kahin, Nationalism and Revolution In Indonesia, a.b. Nin Bakdi Soemanto, *Refleksi Pergmulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta : UNS Press dan Pustaka Harapan, 1995, hlm. 428.

diplomasi, diantaranya adalah L.N. Palar, sedangkan kelompok berikutnya adalah Sri Sultan dan rakyat Yogyakarta yang tetap tinggal di Ibukota sebagai “penjaga gawang” untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI.

### **1. Sikap Tegas Sri Sultan**

Sementara itu ibukota Republik yang telah dikuasai Belanda membuat Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan (yang juga merangkap Menteri Koordinator Keamanan) dan wakil kepala daerah Paku Alam VIII meletakkan jabatannya. Hal ini dimaksudkan agar segala hal yang terjadi di Yogyakarta adalah tanggung jawab Belanda yang telah menguasainya. Sri Sultan juga menginstruksikan kepada para pegawai Pamong Praja supaya membantu TNI yang akan berfungsi sebagai pemerintahan militer.<sup>18</sup> Instruksi ini juga sekaligus merupakan persiapan untuk mengadakan perlawanan gerilya yang akan dilakukan oleh pamong praja dibawah pimpinan Sri Sultan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pranoedjoe Poespaningrat, *Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru*. Jakarta : PB. Kedaulatan Rakyat, hlm. 213.

<sup>19</sup> Bunyi instruksi tersebut adalah : a. Sultan, Paku Alam dan Staf Jawatan Praja DIY tetap di kota Yogyakarta; b. Apabila suatu tempat diduduki tentara Belanda, pamong praja supaya berusaha jangan sampai jatuh ditangan Belanda; c. Pamong Praja termasuk pamong desa harus tetap berada di dalam wilayahnya masing-masing memimpin dan melindungi rakyatnya dengan cara bagaimanapun juga menetapi instruksi b; d. Hubungan dengan pemimpin daerah Sri Sultan dan Sri Paku Alam harus sebanyak-banyaknya diatur secara illegal; e. Jawatan Praja memberikan kodennya dan Kabupaten begitu juga; f. Kurir (penghubung) tidak boleh membawa surat, semua laporan dan instruksi disampaikan oleh kurir dari Jawatan Praja dan Kabupaten dengan menyampaikan kode buat legitimasi; g. Jawatan Praja ialah penghubung Kepala Daerah dan Kabupaten, Kepanewon, tentara, polisi, badan-badan perjuangan, serta kementerian-kementerian. Lihat P.J. Soewarno, *Hamengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1947*. Yogyakarta : Kanisius, 1994, hlm. 242.

Selama minggu-minggu berikutnya, pasukan bersenjata Belanda dengan bantuan kuat dari angkatan udara, telah berhasil merebut kota-kota penting yang masih dikuasai Republik di Jawa dan Sumatera. Kepada pihak internasional Belanda melaporkan bahwa hanya mendapat sedikit perlawanan dari Republik dan bahwa penduduk menerima kedatangan pasukan mereka sebagai penyelamat.<sup>20</sup> Mereka juga melakukan sensor terhadap berita-berita yang keluar dari Indonesia sehingga fakta-fakta yang sebenarnya tidak diketahui.

Ibukota RI kini dikuasai Belanda, TNI bergerilya dan pucuk pimpinan negara ditawan. Satu-satunya anggota kabinet RI yang berada di Yogyakarta adalah Sri Sultan, hal ini wajar karena Sri Sultan juga merupakan pemimpin tradisional di wilayah itu dan tidak mungkin meninggalkan rakyatnya. Terakhir kali bertemu langsung dengan anggota kabinet yang lain adalah pada saat sebelum sidang kabinet bersamaan dengan Agresi Militer Belanda. Sri Sultan pun tak diijinkan oleh Belanda untuk menemui Soekarno dan pemimpin-pemimpin yang lain sebelum mereka dibawa untuk ditawan Belanda.

Sri Sultan sendiri juga dilarang keluar dari wilayah Keraton oleh Belanda. Ia seolah dikenai tahanan rumah oleh serdadu Belanda. Sri Sultan menyatakan hal itu sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Karena indoktrinasi yang sudah mereka terima, banyak tentara Belanda mulai menyebarkan kampanye ini karena yakin bahwa mereka sedang membebaskan penduduk dari penguasa yang tidak disukai. Slogan dari mereka yang dibawa di Yogyakarta adalah “Ke Yogyakarta untuk menyelamatkan Sultan”. Para perwira dan tentara pada umumnya dianggap sama dengan yang membebaskan Sultan dari tahanan para penguasa Republik tiga tahun sebelumnya, ketika sebenarnya sejak permulaan revolusi Sultan sudah merupakan seorang pemimpin Republik yang terkemuka. Lihat Kahin, *op. cit.*, hlm. 429.

...tentara Belanda sudah sampai di Kantor Pos, sehingga saya tidak jadi ke Gedung Negara, kembali ke Keraton, lalu, ya, hanya menunggu saja. Sore hari itu, kira-kira jam lima, komandan dari Belanda, yaitu Kolonel Van Langen, datang kepada saya memberikan suatu map dari kota Yogyakarta dan di mana Keraton dikurung dengan tinta merah dan van Langen mengatakan kepada saya atas dasar untuk *security* daripada saya sendiri supaya tidak keluar dari lingkaran merah itu...<sup>21</sup>

Kedudukan Sri Sultan tidak dapat diganggu oleh Belanda, begitu pula Sri Paku Alam, hal ini dikarenakan Belanda sendiri yang menyatakan bahwa Keraton, Puro Pakualam dan Kepatihan merupakan daerah *imun* yang tidak akan diganggu. Belanda tidak cukup berani untuk mengganggu mereka, karena mereka adalah raja yang merupakan faktor inti dan terkandung kaitan emosional masyarakat secara sosiokultural dengan wilayah dan jelajah spirit melebihi kemampuan dan takaran rakyat jelata. Sehingga apabila mereka ditindak akan sangat mengguncangkan dan akan menaikkan pertentangan dengan luar negeri.

Belanda beserta pasukannya memang telah berhasil menguasai Ibukota Yogyakarta, sesuai dengan strategi mereka, bahwa untuk menghancurkan RI harus dilakukan penghancuran ibukotanya terlebih dulu serta menangkap pemimpinnya. Namun setelah mereka berhasil menguasai kota, tentu muncul masalah yang sangat penting, yakni mengambil alih pemerintahan, khususnya Yogyakarta. Secara umum untuk mengendalikan pemerintahan adalah menggerakkan pemerintah sipil yang telah dikuasai untuk menjalankan roda pemerintahan. Disinilah Sri Sultan membuat Belanda kesulitan yang sangat berat.

---

<sup>21</sup> Sri Sultan HB IX, “Republik Dibawah Kepungan”, dalam Colin Wild dan Peter Carey (Peny), *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia, 1986, hlm.189.

Dalam posisinya yang semakin terdesak di dunia internasional, Belanda kemudian menaruhkan harapannya kepada Sri Sultan, yang merupakan Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Yogyakarta serta salah satu menteri dalam Kabinet RI. Belanda membujuk Sri Sultan agar bersedia bekerjasama dan menjalankan roda pemerintahan dibawah kendali Belanda tentunya. Namun usaha Belanda dalam membujuk Sri Sultan agar mengkhianati RI secara tegas ditolaknya.

Belanda berkali-kali mengirimkan utusan untuk menemui Sri Sultan, seperti Residen E.M. Stok, Dr. Berkhuis dan Kolonel Van Langen, penguasa militer Yogyakarta, serta orang Indonesia yang menduduki jabatan tinggi di Belanda, yakni Prof. Husein Djajadiningrat serta Sultan Hamid II. Mereka semua mendapat tanggapan yang mengecewakan dari Sri Sultan, bahkan Sri Sultan tidak pernah menemui mereka secara langsung. Sri Sultan mewakilkan kakak tirinya, Pangeran Prabuningrat untuk menanggapi bujukan mereka.<sup>22</sup> Ketegasan Sri Sultan menunjukkan tabiat seorang negarawan sejati serta menunjukkan bahwa beliau adalah raja Jawa yang memegang prinsip *tan kena wola wali* (ucapan seorang Raja harus tegas, tidak bisa berubah dan tidak perlu diucapkan berkali-kali), suatu falsafah luhur yang harus dipegang teguh oleh raja-raja Jawa.

Bujukan Belanda bukanlah hanya bujukan yang sederhana, melainkan dengan imbalan yang sangat luar biasa. Belanda menjanjikan Sri Sultan akan

---

<sup>22</sup> Prabuningrat atau Tinggarta adalah anak ke-14 HB VIII dari selir Puspitaningdiah. Ia bersama-sama dengan Dorodjatun (HB IX) juga pernah menempuh pendidikan di Leiden, Belanda. Lihat Pranoedjoe Poespaningrat, *op.cit.*, hlm. 214.

diberi kekuasaan wilayah di daerah Kedu dan Banyumas, kemudian ditambah dengan beberapa daerah di Jawa Timur. Dikarenakan bujukan tersebut tidak berhasil maka kemudian Belanda menjanjikan Sri Sultan dengan kedudukan Super Wali Negara atas seluruh Jawa dan Madura.<sup>23</sup> Seandainya Sri Sultan bersedia menerima jabatan tersebut, ini berarti kekuasaan yang selalu diperebutkan oleh raja-raja Mataram terdahulu sudah tercapai, bahkan dengan mudah bagi Sri Sultan. Sri Sultan yang sekarang memang berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang mementingkan kekuasaan.

Belanda kini menyadari bahwa Sri Sultan bukanlah raja yang mudah disuap dengan janji-janji kekuasaan ataupun jabatan. Dengan demikian Belanda sangat kesulitan untuk mendirikan pemerintahan boneka sebagaimana yang telah mereka bentuk di wilayah-wilayah yang lain. Belanda telah keliru dalam memperhitungkan sikap dan watak Sri Sultan.

## 2. Dukungan Sri Sultan Terhadap Gerilyawan

Sementara itu sebelum Panglima Besar Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk bergerilya, beliau mengeluarkan Perintah Kilat No. 1/PB/D/48 yang pada intinya memerintahkan seluruh Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Teks Perintah Kilat tersebut pada tanggal 19 Desember 1945 segera diserahkan kepada Kapten Suparjo Rustam untuk disampaikan kepada Kadet Utoyo Kolopaking. Kadet

---

<sup>23</sup> Kustiniyati Mochtar, “Pak Sultan dari Masa ke Masa”, dalam Atmakusumah (Peny), *Tahta Untuk Rakyat Celaht-celaht Kehidupan Sultan HB IX*, Jakarta : PT. Gramedia, 1982, hlm. 75.

Utoyo Kolopaking segera menghubungi RRI Yogyakarta untuk menyiaran perintah kilat tersebut.

Melalui perintah kilat tersebut pasukan Republik mengubah strategi perlawanan dari perang linier menjadi perang gerilya. Pasukan Republik menarik diri dari dalam kota menuju desa-desa untuk mendirikan basis-basis perlawanan gerilya. Sistem perlawanan yang digunakan adalah sistem pertahanan *Wehrkreise*. Istilah ini berasal dari bahasa Jerman, *wehr* yang berarti pertahanan dan *kreise* yang berarti lingkaran.<sup>24</sup> Jadi *wehrkreise* diartikan sebagai lingkaran pertahanan. Sistem ini membagi daerah pertempuran dalam lingkaran Perang Rakyat Semesta serta Perang Gerilya.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, Yogyakarta termasuk dalam wilayah Wehrkreise III yang dipimpin oleh Letkol Soeharto (mantan Presiden RI). Wehrkreise III kemudian dibagi-bagi lagi dalam beberapa *Sub Wehrkreise* (SWK), yaitu sebagai berikut.

- a. SWK 101 kota Yogyakarta dengan komandan Letnan Marsudi
- b. SWK 102 Bantul dengan komandan Mayor Sarjono
- c. SWK 103 Gamping dengan Letkol Suhud
- d. SWK 103A Godean dengan komandan Mayor V. Sumual
- e. SWK 104 Sleman dengan Mayor Sukasno
- f. SWK 105 Yogyakarta Timur dengan Mayor Sujono

---

<sup>24</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 9*. Bandung : Angkasa, 1977, hlm. 39.

<sup>25</sup> Sri Retna Astuti, Peranan Sub Wehrkreise 105 pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di DIY : Suatu Kajian Sejarah Lisan. *Patra Widya*. Vol.7. No.2. September 2002, hlm. 11.

g. SWK 106 Kulon Progo dengan Letkol Sudarto.

TNI melakukan pertahanan dengan bergerilya sesuai dengan instruksi Panglima Besar Soedirman. Hal ini sangat didukung oleh Sri Sultan dengan melindungi para gerilyawan di dalam Keraton, termasuk perbekalan, uang ratusan gulden, dll.<sup>26</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Keraton merupakan wilayah *imun* yang tidak bisa dimasuki oleh pasukan Belanda tanpa ijin Sri Sultan. Oleh karena itu para gerilyawan dapat dikatakan cukup aman untuk bersembunyi di dalam Keraton. Selain perlindungan tempat bagi gerilyawan, Sri Sultan juga menyokong dana bagi yang memerlukan. Bantuan dana selain diberikan kepada pegawai-pegawai di berbagai kementerian juga diberikan kepada pejuang TNI yang bergerilya.

Para gerilyawan biasanya menyerang pos-pos Belanda pada malam hari. Ketika siang mereka telah kembali ke markasnya masing-masing dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Para gerilyawan bagaikan “hantu”, pada siang hari mereka tidak terlihat dan bersembunyi di Keraton, Pura Pakualaman, kompleks Taman Siswa dan gedung-gedung para Pangeran. Di dalam Keraton juga tersimpan suplai persenjataan peninggalan Jepang seperti granat dan mesiu yang atas perkenan Sri Sultan disimpan di Bangsal Kencono, sebelah selatan Pagelaran Keraton. Istana Sri Sultan seolah merupakan markas pejuang yang tidak

---

<sup>26</sup> Suhartono W. Pranoto, *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 1946-1949*. Yogyakarta : Kanisius, 2002, hlm. 116.

berani diganggu oleh Belanda. Begitu pula dengan rumah-rumah para Pangeran di sekitar Keraton yang penuh dengan gerilyawan.<sup>27</sup>

Menurut Himawan Soetanto, serangan Belanda ke Yogyakarta ini dapat dikatakan tidak berhasil, baik secara politis maupun strategis.<sup>28</sup> Belanda terlalu yakin bahwa serangan militernya akan mudah menghancurkan TNI dan melenyapkan RI. Dalam mempersiapkan rencana strateginya, Belanda menilai terlalu tinggi kemampuan militernya dan terlalu mengagap rendah kemampuan dan kesediaan TNI untuk melawan Belanda.

TNI memang ahli dalam melakukan perang gerilya. Hal ini didukung pula oleh kondisi alam yang memang memungkinkan. Dalam pidatonya kepada jajaran TNI, Panglima Besar Soedirman mengungkapkan :

Kita beruntung Allah SWT telah memberikan kepada kita gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, sungai-sungai dan kekayaan alam lainnya yang memungkinkan kita dapat bertahan melakukan perang gerilya melawan musuh yang alat persenjataannya lebih lengkap, dengan jiwa dan semangat perjuangan yang lebih teguh daripada lawan.<sup>29</sup>

### C. Serangan Umum 1 Maret 1949

Meskipun Sri Sultan dikenai tahanan rumah oleh Belanda di Keraton, namun beliau tidak tinggal diam. Sri Sultan justru menunjukkan bahwa ia sangat mencintai Republik dan ingin segera mengusir Belanda yang telah bercokol lama sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaanya. Dengan adanya radio yang ada di

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Juariah Suhardi, Kamis 13 Januari 2011.

<sup>28</sup> Himawan Soetanto, *Yogyakarta Jendral Spoor Versus Jendral Sudirman*. Jakarta : Gramedia Pustaka, 2006, hlm.373.

<sup>29</sup> Tjkropanolo, *Jenderal Sudirman : Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*. Jakarta : Surya Persindo, 1992, hlm. 126.

Keraton membuat Sri Sultan leluasa mengikuti perkembangan internasional, khususnya mengenai perjuangan Indonesia dalam forum diplomasi di PBB.

Menurut berita yang didengar Sri Sultan, PBB akan mengadakan sidang mengenai masalah Indonesia-Belanda pada akhir Februari 1949. Dengan adanya berita tersebut maka kemudian timbulah suatu pemikiran dalam benak Sri Sultan untuk memberitahukan kepada dunia internasional bahwa RI tidak musnah seperti yang digambarkan oleh Belanda. Memang Belanda semenjak menguasai Kota Yogyakarta selalu menggambarkan kepada pihak internasional bahwa RI telah hancur dan TNI telah musnah, padalah RI tetap berdaulat dengan pemerintahan darurat di Sumatera dan TNI tetap utuh dengan bergerilya ke pedalaman-pedalaman bersama pemimpinnya.

### **1. Persiapan dan Pelaksanaan Serangan**

Dengan keadaan yang seperti ini, Sri Sultan kemudian berinisiatif agar supaya gerilyawan melakukan suatu serangan yang dapat mengejutkan pihak Belanda dan memunculkan suatu kondisi yang membuat kacau pasukan Belanda dan akhirnya kondisi yang membuat Belanda terpukul itu disebarluaskan ke dunia internasional termasuk PBB. Hal ini sangat tepat karena upaya diplomasi saja tidak cukup untuk mempertahankan kedaulatan RI apabila tidak diimbangi dengan dorongan dari segi yang lain, dimana salah satunya adalah dengan menunjukkan kemampuan militer. Inisiatif Sri Sultan inilah yang kemudian akan terwujud dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Untuk melakukan hal tersebut tentu Sri Sultan harus berkoordinasi dengan pemimpin TNI, yakni Panglima Soedirman yang sedang bergerilya. Kemudian Sri

Sultan menyuruh sekretarisnya, Selo Sumarjan untuk menulis surat kepada Jenderal Soedirman yang isinya mengharapkan tentara melakukan *show of force*.<sup>30</sup> Pengiriman surat ini melalui perantara para kurir, karena hubungan telekomunikasi tidak memungkinkan. Setelah surat diterima oleh Jenderal Soedirman dan disetujui, maka kemudian Sri Sultan diminta untuk berkoordinasi dengan komandan setempat yang kebetulan adalah Letkol Soeharto (komandan Wehrkreise III).

Sementara itu pimpinan SWK 101/Kota, Lettu Marsoedi membagi wilayah kota menjadi enam sektor agar lebih efektif. Memang diantara SWK yang ada tersebut, SWK 101/Kota pimpinan Lettu Marsudi lebih menonjol yang bergerak di dalam kota dan bertugas mengkoordinasi pasukan WK III dan perbekalan.<sup>31</sup>

Enam sektor kota yang dibagi oleh Lettu Marsoedi adalah :

- a. sektor I daerah Barat dipimpin Lettu Wuston, meliputi daerah Keraton sebelah Barat hingga Ngabean ke selatan
- b. sektor II daerah Timur, meliputi Secodiningratan dipimpin Sudomo
- c. sektor III ke selatan sampai Ngabean utara, Malioboro ke Barat, selatan rel kereta api, dipimpin oleh Mochtar
- d. sektor IV meliputi Secodiningratan, Pakualam ke utara, Malioboro ke Timur rel kereta api, dipimpin oleh Rakido

---

<sup>30</sup> Sri Endang Sumiyati,dkk, *Pelurusan Sejarah Serangan 1 Maret 1949*. Yogyakarta : Media Pressindo, 2001, hlm. 57.

<sup>31</sup> SESKOAD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Jakarta : Citro Lamtoro Gung Persada, 1989, hlm. 213.

- e. sektor V meliputi rel kereta api ke utara, Tugu ke timur dengan dipimpin oleh Supriyadi
- f. sektor VI meliputi rel kereta api ke utara, Tugu ke barat dengan dipimpin oleh Sudarto.

SWK 101 pula yang nantinya akan bertanggung jawab atas keamanan Letkol Soeharto yang akan berkunjung ke Keraton menerima perintah dari Sri Sultan. Setelah pengiriman surat Sri Sultan guna mengundang Letkol Soeharto ke Keraton, maka SWK 101 membuat pengamanan dengan istilah Pagar Betis. Dalam pengawalan ketat, Letkol Soeharto dibawa penunjuk jalan SWK 101, berjalan melalui Kampung Taman, ke timur masuk Kampung Ngadisuryan dan akhirnya sampai di Preboyo. Kemudian Letkol Soeharto berganti pakaian Kejawen yang biasa dipakai abdi dalem kemudian diantar sampai pintu gerbang Margoleno. Di tempat tersebut Letkol Soeharto diterima oleh GBPH. Prabuningrat yang kemudian diantar masuk ruangan Prabuningratan.<sup>32</sup>

GBPH. Prabuningrat menunggu di luar ruangan, jadi dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan empat mata antara Sri Sultan dengan Letkol Soeharto. Dalam pertemuan tersebut Sri Sultan meminta agar Letkol Soeharto melakukan suatu *show of force* yang diharapkan dapat meningkatkan semangat juang TNI dan laskar-laskar pejuang serta dapat menarik perhatian dunia internasional bahwa RI tidak musnah oleh kekuatan Belanda.

Setelah pertemuan dengan Sri Sultan, Letkol Soeharto kemudian menyusun strategi penyerangan. Jadi jelas disini bahwa dalam Serangan Umum 1 Maret

---

<sup>32</sup> Sri Endang Sumiyati,dkk, *op.cit.*, hlm. 27.

1949, peran Letkol Soeharto adalah sebagai pimpinan pelaksana operasional yang bertugas menterjemahkan instruksi atasan di lapangan.<sup>33</sup> Serangan tersebut akan dilakukan secara serempak di beberapa sektor dan yang lebih penting adalah serangan yang dilakukan pada siang hari, bukan malam hari dimana serangan gerilya biasa dilakukan.

Sebelum 1 Maret pasukan telah menyerang pos-pos Belanda dalam jumlah kecil-kecil. Mereka melakukan sabotase, memutus jalur komunikasi, kawat telepon, jalan kereta api, dll. Persiapan serangan besar dilakukan semua SWK. Surat Perintah Kolonel Bambang Sugeng (Panglima Divisi III yang secara hierarki militer membawahi WK III pimpinan Letkol Soeharto) telah dilaksanakan dengan menyerang kedudukan Belanda, yaitu tanggal 9, 16 Januari 1949 dan 4 Februari 1949.<sup>34</sup>

Malam hari sebelum SU 1 Maret, para gerilyawan sudah mulai memasuki kota. Mereka bersembunyi di rumah-rumah warga dan dijamin oleh warga keamanan tempat persembunyiannya. Inilah yang dinamakan pertahanan total semesta, dimana seluruh lapisan masyarakat bahu membahu berjuang melawan Belanda. Bahkan dapur umum juga disiapkan untuk mendukung logistik para gerilyawan. Meski sistem yang digunakan adalah gerilya, namun sepertinya para pejuang tidak kesulitan dalam mendapatkan keperluan logistik bahan pangan. Hal

---

<sup>33</sup> Tim Lembaga Analisis Informasi, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1959*. Yogyakarta : Media Pressindo, 2000, hlm. 56.

<sup>34</sup> Suhartono, W. Pranoto, “Enam Jam di Yogyakarta 1 Maret 1949 Mitos atau Sejarah?”. *Makalah Seminar Sejarah*, Yogyakarta, 1 Maret 2010. Bandung : DISJARAH AD, 2010, hlm. 8.

ini tidak terlepas dari peran Sri Sultan yang telah memerintahkan kepada jajaran pemerintahan daerah untuk mempersiapkan lumbung-lumbung logistik di tiap-tiap Kelurahan.<sup>35</sup>

Pagi hari bersamaan dengan bunyi sirine tanda habisnya jam malam yang ditetapkan Belanda ketika itu, secara serentak dari segala penjuru kota Yogyakarta terdengar rentetan tembakan senjata. Pasukan Belanda yang sama sekali tidak mengira akan datangnya serangan tak sempat keluar dari kubu-kubu mereka dan hanya berusaha bertahan saja.<sup>36</sup> Serangan yang membuat kewalahan tersebut membuat pasukan Belanda meminta bantuan dari Semarang dan Magelang.

Kekuatan gerilya ini terdiri dari TNI, Polisi, AURI, Tentara Pelajar dan Laskar yang semuanya sekitar 2000 personel. Satuan dalam WK III sekitar Yogyakarta seperti Kompi Suwarno dari Yon Daryatmo Muntilan dan Kompi Sudarsono dari Yon Sruharjono Purworejo serta Peleton Sulaksono dari Yon Sunitisono dari WK I Divisi II/M Klaten ikut memperkuat serangan. Mereka kemudian memasuki dan menduduki kota setelah berhasil mendesak pasukan Belanda. Setelah kurang lebih menduduki Yogyakarta selama enam jam, sementara bantuan pasukan Belanda dari Semarang tiba di Yogyakarta pukul 11.00, maka pasukan gerilyawan pun mundur untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak pada pukul 13.00.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan H.Ollot Sajiman, Rabu 22 Desember 2010.

<sup>36</sup> Kustiniyati Mochtar, *op.cit.*, hlm. 80.

## 2. Arti Penting Serangan Umum 1 Maret

Meski hanya menduduki Kota beberapa jam saja, namun serangan ini dapat dikatakan berhasil. Sasaran di bidang militer telah tercapai dengan gemilang, yaitu meninggikan moral rakyat serta TNI yang sedang bergerilya.<sup>37</sup> Keberhasilan ini sangat memalukan pihak Belanda yang selama ini mempropagandakan kepada semua pihak bahwa RI dan TNI telah lenyap. Terlebih pada saat serangan tersebut berlangsung anggota KTN tengah berada di Yogyakarta untuk menyaksikan keadaan yang sesungguhnya. Ironisnya lagi adalah bahwa anggota KTN tersebut mendatangi Yogyakarta atas permintaan Belanda dengan harapan mereka mempercayai Belanda yang telah berhasil menghancurkan RI.

Kemenangan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Sri Sultan dengan mengirim berita ke Bukittinggi, dimana di tempat tersebut Syafruddin Prawiranegara beserta pejabat-pejabat lain memimpin pemerintahan darurat RI. Dari Bukittinggi berita tersebut kemudian disampaikan ke AS setelah sebelumnya dikirimkan melalui New Delhi. Berita Serangan Umum 1 Maret ini membuka politik internasional tentang eksistensi RI.

Setelah pasukan Republik meninggalkan Kota karena pasukan Belanda sudah mulai berdatangan, tibalah saat yang cukup menegangkan di Keraton. Pasukan Belanda meyakini bahwa gerilyawan memang bersembunyi di Keraton atas perlindungan Sri Sultan. Atas dasar tersebut kemudian barisan pasukan Belanda mendatangi Keraton. Salah satu pintu gerbang Keraton ditabrak oleh tank Belanda dan komandan pasukan tersebut memaksa agar Sri Sultan menemuinya.

---

<sup>37</sup> Tim Lembaga Analisis Informasi, *op.cit.*, hlm. 90.

Kolonel Van Langen yang merupakan komandan pasukan Belanda di wilayah Kota Yogyakarta segera melempar tuduhan terhadap Sri Sultan bahwa ada tembakan atau serangan yang berasal dari dalam Keraton. Namun Sri Sultan membantah tuduhan tersebut.

Beberapa hari kemudian terdengar serentetan tembakan gencar ke udara dari sebuah tank yang berhentin di depan rumah GBPH. Prabuningrat, yang terletak sangat dekat pintu masuk Keraton. Kapten de Jonge (ajudan Kolonel van Langen) menyerahkan surat permintaan Jenderal Meijer (Komandan Teritorial dan Komandan pasukan-pasukan Belanda Jawa Tengah) untuk menemui Sri Sultan.<sup>38</sup>

Dengan pengawalan pasukan lapis baja, Jenderal Meijer dan rombongan bertemu Sri Sultan.<sup>39</sup> Pertemuan tersebut mendesak agar Sri Sultan menghentikan sikap non kooperatif dengan Belanda serta menghentikan sikap yang mendukung para gerilyawan. Sri Sultan kemudian menjawab, "...Sebelum Belanda datang, Yogyakarta sudah teratur. Kalau sekarang menjadi kacau mengapa harus saya yang memperbaiki?" Kemudian Sri Sultan menambahkan dengan perkataan yang tegas, "Kalau tuan-tuan ingin memperlakukan Keraton seperti ketika tentara Belanda merampas semua arsip-arsip saya di Kepatihan, lebih baik bunuhlah saya."<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Peristiwa ini dijelaskan oleh Sri Sultan dalam suratnya yang dikirimkan kepada Mr. Sudjono. Isi dari surat tersebut terdapat pada bagian Lampiran.

<sup>39</sup> Rombongan tersebut terdiri dari Kolonel D.B.A van Langen (Komandan pasukan Belanda di Yogyakarta), Dr. Angenen, Stok (Residen Yogyakarta) dan Kapten de Jonge (ajudan van Langen).

<sup>40</sup> Pranoedjoe Poespaningrat, *op.cit.*, hlm. 215.

Setelah mendengar ketegasan Sri Sultan, Jenderal Meijer beserta rombongan tersentak. Beberapa menit kemudian mereka memohon ijin dengan sopan setelah sebelumnya mereka bersikap congkak dan angkuh. Sri Sultan mampu menundukkan mereka dengan perdebatan yang benar-benar memukul telak. Inilah pengalaman yang Sri Sultan dapatkan ketika menempuh pendidikan tinggi di Leiden, Belanda dalam sebuah klub debat.

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 telah membangkitkan kembali kepercayaan rakyat terhadap TNI yang semula mulai menurun akibat agresi Belanda dan pendudukan Belanda atas Yogyakarta. Secara psikologis keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 telah memberikan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan TNI.<sup>41</sup> Hal inilah yang dibutuhkan agar semangat juang rakyat tetap terjaga dan tetap bersatu melawan Belanda.

Untuk membalas peristiwa yang memalukan itu, Belanda menyerang kedudukan para pejuang secara membabi buta di Wonosari, Gunung Kidul. Dari lapangan Andir, Bandung, diterbangkanlah 20 buah DC-3 yang menerjunkan pasukan payung di lapangan Terbang Gading, Gunug Kidul. Namun hasilnya nihil karena ternyata sudah tidak ada lagi pejuang berada di daerah itu. Sementara itu serangan-serangan tetap terus dilakukan para pejuang dan lantaran itu pula tentara Belanda terus melakukan pembersihan di kota dan di desa-desa.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Widodo, "Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 Terhadap Tegaknya Pemerintahan RI". *Makalah Ceramah*, 12 April 1988 di BKSNT Yogyakarta, hlm. 30.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

Sementara itu setelah berita serangan 1 Maret tersebut diterima PBB, Dewan Keamanan memerintahkan agar Belanda segera menghentikan permusuhan di Jawa dan Sumatera. Dari hal ini nampak jelas bahwa propaganda yang dilancarkan oleh Belanda tentang kehancuran RI tidaklah benar. Pihak internasional kini membuka mata dan mengetahui bahwa RI beserta kekuatan militernya masih sangat berpengaruh.

Tekanan-tekanan terhadap Belanda mulai berdatangan, dari Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, negara-negara seperti India, Burma, Mesir, Australia, AS, Inggris bahkan BFO yang merupakan kumpulan negara-negara boneka Indonesia bentukan Belanda. Kini Belanda mengalami kesulitan yang tentunya akan menghambat tujuannya. Tekanan terhadap Belanda semakin dirasakan setelah Dewan Keamanan PBB menerima resolusi baru yang dikenal sebagai “Usul Canada” oleh suatu mayoritas yang terdiri dari delapan suara (termasuk AS).<sup>43</sup> Usul Canada tersebut berisi antara lain :

1. Mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta
2. Penghentian gerilya militer Belanda dan gerilyawan Republik
3. Konferensi Den Haag untuk penyelesaian akhir.

Untuk melaksanakan keputusan tersebut kemudian diadakanlah perundingan antara pihak RI dan Belanda, dimana pihak RI diwakili oleh Moh. Roem dan Belanda D.R. J.H. van Roijen (Perundingan Roem-Roijen). Perundingan tersebut berpokok pada kesediaan Belanda mengembalikan pimpinan RI ke Yogyakarta serta penyerahan kedaulatan kepada RI.

---

<sup>43</sup> G.M. Kahin, *op.cit.*, hlm. 524.

Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Sri Sultan untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dengan Surat Penetapan Presiden tertanggal 1 Mei 1949 di Bangka. Kini dimulailah masa-masa pengorganisasian pemerintahan RI di Yogyakarta serta pembangunan kembali Kepolisian Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sri Sultan juga diberikan wewenang untuk mengatur penarikan mundur pasukan Belanda serta mempersiapkan penyambutan kembali pimpinan-pimpinan RI yang ditawan, termasuk kedatangan Pangsar Soedirman yang akan kembali dari gerilyanya.

Sri Sultan kemudian mengeluarkan Proklamasi 30 Juni 1949 setelah pasukan Belanda berangsur-angsur ditarik mundur. Proklamasi yang dikeluarkan oleh Sri Sultan ini bermaksud agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan sebelum kembalinya Soekarno-Hatta dan para pemimpin lainnya ke Yogyakarta. Proklamasi 30 Juni 1949 ini juga bermaksud untuk menegaskan kembali bahwa seluruh rakyat Yogyakarta tetap konsisten mendukung RI dan tetap menyatu dengan RI.<sup>44</sup>

Keberhasilan ini tentunya berkat seluruh elemen bangsa yang bersatu untuk mengusir Belanda dari RI. Tentara maupun rakyat sipil berjuang bersama sesuai dengan strategi pertahanan gerilya semesta untuk menegakkan kedaulatan yang selama ini mereka idam-idamkan. Marsoedi menyatakan sebagai berikut :

Kemanunggalan tentara rakyat bagaikan ikan dan air. Sekali lagi dalam hal ini rakyat adalah yang pertama menjadi korban musuh. Selain itu terdapat

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan KRT. Jatiningrat, SH., Rabu 22 Desember 2010. Naskah Proklamasi Sri Sultan HB IX juga dimuat dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi 30 Juni 1949. Isi naskah Proklamasi Sri Sultan ini terlampir di halaman Lampiran.

pula figur Sri Sultan yang memilih tetap tinggal di Keraton di tengah-tengah kekuasaan musuh dengan tetap tegar ikut serta memimpin berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda, sehingga melesetlah skenario Belanda untuk menarik Sri Sultan.<sup>45</sup>

Dari hal tersebut terlihat dengan jelas bahwa selain tentara dan rakyat yang bersatu juga terdapat figur Sri Sultan yang menonjol. Sosoknya sangat berpengaruh penting bagi tegaknya kedaulatan negara ini.

---

<sup>45</sup> C.H. Marsoedi, “Peranan Militer dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di DIY”. *Makalah Ceramah dan Diskusi*, Yogyakarta, 20 Agustus 1987, MSI Cabang Yogyakarta dan BPSNT Yogyakarta.